

TRAGEDI DAYAK–MADURA 2001: PERSPEKTIF PERSATUAN INDONESIA DALAM SILA KETIGA

**M. Amirul Fahmi¹, Ahmad Syaifullah Al-Habib², Firda Eka Safitri³, Fa'idhotur Rohmah⁴,
Marlina Yuliyanti⁵, Day Ramadhani Amir⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Ikip PGRI Bojonegoro

E-mail: ¹amirulfahmi148@gmail.com, ²hsyaifullah644@gmail.com, ³safitfirirdaeka4@gmail.com,
⁴ffaiq6196@gmail.com, ⁵marlinayuliyanti26@gmail.com,
⁶day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, pada tahun 2001, sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dalam masyarakat multikultural. Penelitian dilakukan melalui metode tinjauan literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas konflik etnis dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga: Persatuan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh faktor struktural dan kultural, seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, serta lemahnya pengelolaan keberagaman. Temuan juga menunjukkan bahwa implementasi nilai persatuan belum berjalan optimal dalam konteks masyarakat plural. Upaya pasca-konflik, seperti rekonsiliasi sosial dan pendekatan berbasis kearifan lokal, menjadi kunci dalam membangun kembali kohesi sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila secara konkret, pengembangan dialog antarbudaya, dan kebijakan multikultural yang adil dan inklusif guna mencegah konflik serupa di masa depan serta mewujudkan persatuan bangsa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Konflik Sampit, Dayak–Madura, Sila Ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia, Kebhinekaan.

Abstract

This study aims to analyze the ethnic conflict that occurred in Sampit, Central Kalimantan, in 2001, as one of the most severe humanitarian tragedies in modern Indonesian history. The conflict between the Dayak and Madurese communities reflects the complex dynamics of multicultural societies. This research employs a literature review method by collecting and analyzing references from books, journals, and scholarly articles related to ethnic conflict and the values of Pancasila, particularly the third principle: the Unity of Indonesia. The findings indicate that the root causes of the conflict stemmed from structural and cultural factors, including economic disparities, social marginalization, and weak diversity management. The study also reveals that the implementation of unity values was suboptimal within the context of a plural society. Post-conflict reconciliation efforts, such as social healing and local wisdom-based approaches, were essential in rebuilding social cohesion. This research emphasizes the importance of concretely reinforcing Pancasila values, fostering intercultural dialogue, and promoting fair and inclusive multicultural policies to prevent similar conflicts in the future and to realize sustainable national unity.

Keywords: Sampit Conflict, Dayak–Madurese, 3rd Principle of Pancasila, Indonesian Unity, Diversity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan bahasa, budaya, dan identitas yang beragam. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan bangsa. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan upaya negara dalam menyatukan keberagaman tersebut di bawah satu identitas nasional. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa kebhinekaan juga menyimpan potensi konflik, terutama ketika

ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan diskriminasi identitas tidak dikelola dengan bijak. Salah satu contoh nyata dari kegagalan dalam menjaga harmoni sosial adalah Konflik Sampit tahun 2001, yang melibatkan benturan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah (Jurnal Sosial Unmer Madiun, 2018).

Konflik ini tidak hanya berdampak pada korban jiwa dan kerusakan materi, tetapi juga mengguncang prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang dijunjung dalam Sila Ke-3 Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia.” Nilai-nilai persatuan yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial tampak belum sepenuhnya terinternalisasi di tengah masyarakat multikultural. Menurut Ruslikan (2001), konflik ini dipicu oleh akumulasi ketegangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta stereotip etnis yang telah berlangsung lama. Ketika ketegangan itu mencapai titik didih, ledakan kekerasan menjadi tak terhindarkan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem sosial dalam meredam konflik berbasis identitas serta minimnya kehadiran negara dalam mediasi yang adil dan tegas.

lanjut, analisis dari Fawaidi, Erawan, dan Bandiyah (2019) mengungkap bahwa kepentingan ekonomi dan politik turut memperkeruh konflik, karena elite lokal kerap memanfaatkan isu etnis untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, Sila Ke-3 Pancasila seharusnya menjadi perekat yang menyatukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Namun, kenyataannya, nilai tersebut belum menjadi kesadaran kolektif, baik di level masyarakat akar rumput maupun di kalangan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, kajian terhadap Konflik Sampit menjadi penting bukan hanya untuk memahami dinamika konflik itu sendiri, tetapi juga sebagai upaya reflektif untuk memperkuat konsep persatuan Indonesia melalui rekonsiliasi, pendidikan kebangsaan, dan penegakan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (*library research*) sebagai metode utama untuk menganalisis Konflik Sampit tahun 2001 dalam perspektif Sila Ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang analitis yang luas terhadap dokumen-dokumen ilmiah yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika konflik, faktor penyebabnya, serta proses rekonsiliasi pasca-konflik dalam bingkai nilai persatuan. Metode ini juga sesuai digunakan dalam kajian normatif dan konseptual mengenai hubungan antara etnisitas dan kebangsaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia (Jurnal Sosial Unmer Madiun, 2018; Fawaidi et al., 2019).

Proses penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi karya ilmiah yang telah dipublikasikan, termasuk artikel jurnal, tesis akademik, serta publikasi dari institusi pendidikan yang kredibel. Sumber literatur utama berasal dari daftar pustaka yang telah ditentukan, antara lain artikel dari Jurnal Sosial Unmer Madiun mengenai kronologi dan dinamika konflik Dayak-Madura, analisis konflik etnis dalam Jurnal *Integralistik UNNES* (2018), serta studi mengenai hubungan kepentingan ekonomi-politik dalam konflik oleh Fawaidi, Erawan, dan Bandiyah (2019). Literatur tambahan juga diambil dari Repository Universitas Jember (2014) yang secara spesifik membahas konflik di Kotawaringin Timur sebagai lokasi utama peristiwa tersebut.

Setelah semua literatur dikumpulkan, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama seperti akar konflik, dampak sosial-politik, respon negara, serta relevansinya dengan prinsip persatuan dalam Pancasila. Kajian ini juga mencermati bagaimana upaya rekonsiliasi dilakukan pasca-konflik dan sejauh mana pendekatan yang diambil sesuai dengan semangat kebangsaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan keberagaman dan pencegahan konflik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Latar Belakang Konflik Sampit 2001

Konflik Sampit yang meletus pada Februari 2001 sesungguhnya merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Menurut Jurnal Sosial Unmer Madiun (2018), ketegangan ini berakar sejak era kolonial Hindia-Belanda ketika penduduk Madura mulai dipindahkan ke Kalimantan melalui program transmigrasi. Selanjutnya, ketidakseimbangan jumlah penduduk yang signifikan, dengan transmigran Madura mencapai 21% populasi pada tahun 2000, memperparah persaingan sosial dan ekonomi antara kedua kelompok etnis. Lebih jauh, Ruslikan (2001) menjelaskan bahwa pemicu langsung konflik adalah peristiwa kematian seorang warga Dayak akibat bentrokan kecil di Kereng Pangi pada Desember 2000, yang kemudian memicu gelombang kekerasan luas dan berdarah pada Februari 2001. Peristiwa ini menjadi titik balik di mana ketegangan lama meledak menjadi konflik fisik yang besar.

Faktor-faktor Struktural dan Kultural Penyebab Konflik

Selain insiden pemicu tersebut, konflik ini memiliki akar yang lebih dalam yang bersifat struktural dan kultural. Sebagaimana diuraikan dalam Politika oleh Fawaidi et al. (2019), ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama penyebab ketegangan. Suku Dayak merasa tersingkir dalam penguasaan sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan yang didominasi oleh warga Madura. Ketimpangan tersebut menimbulkan rasa frustrasi dan kecemburuan sosial yang meningkat, sehingga membuka ruang bagi konflik. Selanjutnya, Ningsih et al. (2021) mengemukakan bahwa perbedaan identitas etnik dan politik lokal pasca-konflik turut memperkuat polarisasi sosial dan memperlebar jarak antar komunitas. Suku Dayak merasa bahwa suku Madura kurang menghargai struktur sosial dan budaya lokal, sementara suku Madura mengalami tekanan sosial dan eksklusif, yang secara bersama-sama memperdalam ketegangan. Oleh karena itu, konflik ini bukan sekadar akibat kejadian insidental, melainkan manifestasi ketegangan sosial dan budaya yang menumpuk selama bertahun-tahun.

Dampak Kemanusiaan dan Implikasi Sosial dari Konflik

Dampak konflik ini sangat besar, baik dari sisi kemanusiaan maupun sosial. Jurnal Sosial Unmer Madiun (2018) melaporkan bahwa jumlah korban tewas mencapai ratusan orang, dengan lebih dari 100.000 warga, terutama etnis Madura, terpaksa mengungsi ke daerah-daerah aman. Selain itu, Jurnal Integralistik UNNES (2018) mencatat kerusakan materiil berupa pembakaran rumah dan fasilitas umum yang meluas, sehingga memperparah penderitaan masyarakat. Secara sosial, konflik ini menimbulkan trauma mendalam serta memperkuat sentimen primordial yang melemahkan rasa persatuan dan kebangsaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Widen (2021), yang menunjukkan bahwa tragedi ini merusak tatanan sosial dan meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kohesi antar kelompok etnis di Kalimantan Tengah.

Analisis Konflik dalam Perspektif Sila Ke-3 Pancasila

Jika ditinjau dari perspektif Sila Ke-3 Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia,” konflik ini menunjukkan kegagalan dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam tesis Repository Universitas Jember (2014), kegagalan pemerintah dalam mengelola keberagaman secara adil dan inklusif merupakan faktor penting penyebab konflik. Kebijakan transmigrasi yang kurang diimbangi dengan strategi integrasi sosial turut memperbesar segregasi antar etnis. Selanjutnya, Alexandra dan Frisca (2018) menegaskan bahwa konflik ini merupakan hasil dari akumulasi ketimpangan dan privasi sosial yang tidak ditangani secara sistematis, yang pada akhirnya melemahkan nilai-nilai persatuan dalam

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konflik Sampit mengindikasikan masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik sehari-hari.

Rekonsiliasi dan Upaya Pemulihan Pasca-Konflik

Setelah konflik mereda, berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Menurut Jurnal Integralistik UNNES (2018), pertemuan formal yang difasilitasi oleh pemerintah mampu menurunkan ketegangan, namun hasilnya masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah yang lebih mendalam. Pendekatan berbasis kearifan lokal melalui ritual adat perdamaian yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak justru menunjukkan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan dalam membangun kembali kepercayaan antar kelompok.

Lebih lanjut, Repository Universitas Jember (2014) menegaskan bahwa proses pemulihan tidak cukup hanya dengan rekonsiliasi formal. Banyak penyintas yang masih mengalami kesulitan secara sosial dan ekonomi, termasuk keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Program pemulihan pemerintah dinilai belum menjangkau semua korban secara merata, terutama dalam aspek dukungan psikososial dan reintegrasi sosial.

Dalam konteks ini, Jurnal Sosial Unmer Madiun (2018) juga mencatat bahwa trauma kolektif yang dialami oleh komunitas terdampak masih menyisakan luka sosial yang mendalam, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat memicu konflik baru di masa depan. Oleh karena itu, pemulihan pasca-konflik harus dirancang secara komprehensif, melibatkan pendekatan budaya, ekonomi, dan psikologis.

Pembelajaran dan Langkah Preventif untuk Masa Depan

Konflik Sampit memberikan pelajaran penting bahwa membangun toleransi dan pemahaman antar kelompok etnis perlu dimulai sejak dini melalui pendidikan multikultural dan penguatan dialog antarbudaya. Widen (2021) menekankan bahwa pemulihan pasca-konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga perlu memperkuat komunikasi lintas budaya dalam sistem pendidikan nasional guna menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Di sisi lain, Fawaidi et al. (2019) mengungkapkan bahwa konflik ini juga tidak lepas dari faktor ekonomi-politik, di mana ketimpangan penguasaan sumber daya menciptakan ketegangan horizontal. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ekonomi yang berkeadilan menjadi penting untuk menjamin keseimbangan distribusi kekayaan antar kelompok masyarakat. Hal ini juga mencakup perlunya afirmasi terhadap kelompok-kelompok lokal yang selama ini merasa termarjinalkan.

Jurnal Integralistik UNNES (2018) merekomendasikan bahwa kebijakan multikulturalisme harus bersifat substantif, tidak hanya simbolik, agar mampu menciptakan ruang interaksi yang setara antara kelompok mayoritas dan minoritas. Partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk tokoh adat dan pemuda lintas etnis, harus dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial.

Sebagai bagian dari pencegahan konflik di masa depan, Politika (Fawaidi et al., 2019) juga mengusulkan pentingnya sistem peringatan dini dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Strategi ini diperlukan agar potensi konflik dapat dikenali sejak awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Seluruh langkah ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Ke-3, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman.

KESIMPULAN

Konflik Sampit 2001 merupakan tragedi kemanusiaan yang mencerminkan lemahnya implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam Sila Ke-3 Pancasila. Menurut Jurnal Sosial Unmer Madiun (2018) dan Ningsih et al. (2021), konflik ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan ketegangan identitas kultural yang tak tertangani dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jurnal Integralistik UNNES (2018), dampaknya mencakup korban jiwa, kerusakan materi, serta trauma sosial jangka panjang. Berdasarkan temuan Repository Universitas Jember (2014), nilai-nilai persatuan belum terinternalisasi dalam kebijakan sosial, sementara Jurnal Sosial Unmer Madiun (2018) menambahkan bahwa pendekatan pemerintah masih perlu diperkuat dengan inisiatif lokal yang berbasis budaya.

Menurut Alexandra dan Frisca (2018), penguatan dialog dan kebijakan multikultural yang adil menjadi kunci pencegahan. Fawaidi et al. (2019) juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini, dan Ningsih et al. (2021) menyoroati peran komunitas lokal dalam menjaga kohesi sosial.

Dengan demikian, konflik ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman sebagai fondasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra & Frisca. (2018). Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2). <https://doi.org/10.33005/jgp.v6i02.1821>
- Fawaidi, A., Erawan, K. P., & Bandiyah. (2019). *Proses Bertemunya Kepentingan Ekonomi dan Politik di Balik Konflik Etnis Kalimantan Tengah*. *Politika*, 10(1), 45–60. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/61971/35635>
- Jurnal Integralistik UNNES. (2018). *Resolusi Konflik Etnis Antara Madura dan Dayak di Kalimantan Tengah*. *Integralistik*, 6(1), 2238. <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/download/43306/14803>
- Jurnal Sosial Unmer Madiun. (2018). *Perang Sampit (Konflik Suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah)*. *Jurnal Sosial*, 7(1), 112–130. <https://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/download/112/73/371>
- Ningsih, M. R., Aldirdaus, L. K., & Sadini, N. H. (2021). *Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah*. *JPGS Undip*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/32707/26215>
- Repository Universitas Jember. (2014). *Konflik Etnis Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur (Tesis)*. Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61947/1/070110301088_1.pdf
- Ruslikan. (2001). *Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, XIV(4), 1–12. <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/1%20Ruslikan.pdf>
- Widen, K. (2021). *Dampak Konflik Sosial Antar Etnis Tahun 2001 terhadap Pola Interaksi Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah*. *Jurnal Sosial*, Universitas Palangka Raya. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/download/3710/2840>